

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

- Apeldoorn Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Assiddiqie Jimly, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- _____, *Konstitusi dan konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2004.
- _____, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009.
- _____, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Arifin Zainal Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman (Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism vs Judicial Restrain*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2021.
- Bachtiar, *Metode Penelitian hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018.
- Beetham David, *Democracy and Human Rights*, Polity Press, Cambridge, 1999.
- Budiardjo Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- DKPP RI, *Penyelenggara Pemilu Di Dunia*, DKPP RI, Jakarta, 2015.
- Fatmawati, *Hak Menguji (toetsingrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Gaffar Janedri, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta, Konstitusi press, 2012.
- Hariadi Didit Estiko, *Mahkamah Konstitusi :Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, P3I Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2003.
- Hidayat Nur Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011.
- Huda Ni'matul, *Negara Hukum demokrasi dan judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Indra Triya Rahmawan, *Menafsir Demokrasi Konstitusional: Pengertian, Rasionalitas, Dan Status Demokrasi Konstitusional Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 Menurut Mk*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2014.

- Junaidi Veri, *Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator*, Themis Book, Jakarta, 2013.
- Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia I*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, 2021.
- Manan Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Melvin I. Urofski, *Naskah Pertama: Pendahuluan: Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi, Majalah Demokrasi*, Departemen Informasi Internasional Amerika Serikat, Washington D.C., 2001.
- Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Nawawi Hadar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- Prihatmoko Joko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistem dan Problema di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Purnama Eddy, *Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*, Nusamedia, Bandung, 2007.
- Rosyada Iksan Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi :Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Santoso Topo, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Siahaan Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014.
- Soimin, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Sorensen George, *Demokasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Surbakti Ramlan dkk, *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Partnership, Jakarta, 2008.

Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UNISSULA PRESS, Semarang, 2016.

Yuli Merwanda Yusandi, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, Bandar Lampung*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2012.

B. Jurnal

Ayuni, *Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 48 Nomor 1, 2018.

Hastuti Sri Puspitasari, *Mahkamah Konstitusi Dan Penegakkan Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Volume 8 Nomor 3, 2011.

Helmi & Erliyana, *Konstruksi Hukum Diskualifikasi Calon Petahana Pada Pemilihan Kepala Daerah*, Pakuan Law Review, Volume 4 Nomor 2, 2019.

Kuala Fajar Nugraha, *Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)*, Jurnal Transformative, Volume 2 Nomor 1, 2016.

M. Mahrus Alifi dkk, *Tafsir Konstitusi Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif*, Jurnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 1, 2012.

Nur Irfan Rachman, *Mahkamah Konstitusi dan Pseudo Judicial Review Dalam Perkara Pemilu*, Jurnal Konstitusi Vol. 2, Nomor 1, 2015.

Rosenfeld Michel, *The Rule of Law and The Legitimacy of Constitutional Democracy*, Southern California Law Review, Vol. 74, 2001.

Suhaimi, *Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal YUSTITIA, Volume 19, Nomor 2, 2018.

Tohari Ahsin A, *Mahkamah Konstitusi dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 3, 2009.

C. Internet

Dewan Pers, 7 Oktober 2011, *UUD 1945 Sebagai Konstitusi Sosial*, <https://dewanpers.or.id/berita/detail/263/uud-1945-sebagai-konstitusi-sosial>, Diakses 4 Agustus 2023.

Kementrian Komunikasi dan Informatika, 13 Juni 2019, *270 Daerah Akan Gelar Pilkada Serentak Pada 2020*,

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/19260/270-daerah-akan-gelar-pilkada-serentak-pada-2020/0/berita>, diakses 23 Januari 2024.

Mahkamah Konstitusi, 8 April 2021, *Kantor Imigrasi Klarifikasi Status Kewarganegaraan Orient*, <https://www.mkri.id/index.php>, diakses pada 25 Mei 2023.

_____, *Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah*, <https://www.mkri.id/index.php>, Diakses 10 November 2023.

_____, *REKAPITULASI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH/PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA*, <HTTPS://WWW.MKRI.ID/INDEX.PHP?PAGE=WEB.REKAPHPUD&MENU=4>, diakses 8 November 2023.

D. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

E. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021.

